

## ABSTRAK

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Hal menimbulkan pengaruh yang bersifat positif tetapi juga negatif. Pengaruh negatif ini harus dihadapi dan bahkan memerlukan pencegahan atau penanggulangan melalui instrumen hukum. Pengaruh yang bersifat positif sangat menunjang kelangsungan pemerintahan negara untuk mensejahterakan warganya sebagai mana yang di amanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pengaruh yang bersifat negatif merupakan hambatan atau kendala yang dihadapi oleh negara untuk mencapai tujuannya. misalnya, pelanggaran peraturan. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kabupaten Demak merupakan salah satu kota yang juga banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, penulis turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Demak sehingga dapat mengetahui apa saja hambatan yang di peroleh serta solusi yang di berikan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Demak. Sedangkan manfaat dari penelitian ini untuk memberi wawasan bagi pembaca terhadap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan penerapan sanksi yang diberlakukan.

Selama ini tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparat Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparat penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para PKL tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan pengusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Namun penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Demak selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kabupaten Demak belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kabupaten Demak. Hal ini terlihat dengan dilakukannya pemberian bantuan tenda oleh Kementrian Perdagangan, sedangkan bantuan tersebut dimanfaatkan untuk membangun bangunan permanen di pinggir jalan oleh PKL.

*Kata Kunci : Implementasi, Penertiban dan Pedagang Kaki Lima (PKL)*

## ABSTRACT

Street vendors (PKL) are a common phenomenon that occurs in big cities in Indonesia. This has a positive but also negative effect. This negative influence must be faced and even requires prevention or countermeasures through legal instruments. The positive influence greatly supports the continuity of the state government for the welfare of its citizens as mandated in the Preamble to the 1945 Constitution (UUD 1945). Negative influences are obstacles or obstacles faced by the state to achieve its goals. for example, violation of regulations. The case of street vendors is considered by many as a form of the government's failure to provide employment for the poor. Demak Regency is one of the cities which is also inhabited by street vendors.

This research was conducted using a sociological juridical method, the authors went to the field to observe and interview directly with research informants. The problem in this study is to find out how the implementation of the policy of controlling street vendors in Demak Regency so that they can find out what obstacles are obtained and the solutions provided by the Demak Regency Government. Meanwhile, the benefits of this research are to provide insight for readers to the development of legal science in general and the development of the application of sanctions imposed. It is not uncommon for law enforcement officers to carry out evictions and confiscation of places selling street vendors who are still stubborn and do not listen to the officers.

So far, control measures have been carried out by the Satpol PP apparatus. Control activities carried out by enforcement officers are usually in the form of expulsion of the street vendors. It is not uncommon for law enforcement officers to carry out evictions and confiscation of places selling street vendors who are still stubborn and do not listen to the officers. However, the control of street vendors (PKL) in Demak Regency so far has not been carried out optimally. This is caused by several factors, such as: (1) There is no strict punishment for street vendors who still sell on the roadside despite repeated warnings by officers. The punishments given so far are only administrative in nature or warnings, expulsion and temporary confiscation of street vendors' goods. (2) The Government of Demak Regency has not been consistent and unified in responding to the presence of street vendors in Demak Regency. This can be seen by the provision of tents by the Ministry of Trade, while the assistance is used to build permanent buildings on the side of the road by street vendors.

**Keywords:** Implementation, Control and Street Vendors (PKL).